

besar di balaidesa terkait adanya *event-event* tertentu yang diadakan di wisata maupun informasi dan diskusikan yang berhubungan dengan kepentingan wisata. Dan dikatakan informal karena proses komunikasi juga terjadi kapan saja dan dimana saja ketika kedua belah pihak bertemu, biasanya terjadi ketika pihak satgas yang diteliti yaitu bendahara wisata yang juga berjaga di bagian loket sedang melakukan setoran uang kepada pihak pemerintah desa. Pada kesempatan itu satgas melakukan komunikasi interpersonal secara langsung atau tatap muka (*face to face*) dengan pihak perangkat desa yang bertugas di balaidesa terkait keluhan pedagang, wisatawan, anggota satgas yang lain keadaan wisata. Hal tersebut yang dapat dikatakan sebagai komunikasi verbal.

Selain itu juga ketika pemerintah desa mengomentari tentang penampilan petugas satgas, pemerintah desa secara langsung mengajak berbicara petugas satgas tersebut dengan santai terkait hal yang hendak ia diskusikan yaitu mengenai penampilannya yang alangkah baiknya jika diperbaiki. Petugas menyetujui usulan dari pemerintah desa dengan senang hati kemudia pada keesokan harinya petugas satgas tersebut mengubah penampilannya dengan lebih baik yang bisa dikatakan sebagai tindakan komunikasi non verbal. Adanya tindakan secara langsung tersebut merupakan respon dan *feedback* yang diberikan oleh satgas setelah melakukan komunikasi dengan perangkat desa.

Sebaliknya untuk umpan balik atau *feedback* yang diberikan oleh perangkat desa adalah ketika mendapat usulan dari wisatawan yang

disampaikan oleh petugas satgas, perangkat desa kemudian membangun *icon-icon* wisata seperti yang diharapkan oleh wisatawan sebagai alat memperlak wisatawan. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai tindakan komunikasi non verbal yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Mengenai kegunaan bahasa, bahasa yang digunakan pemerintah desa ketika berinteraksi adalah menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. Kerap kali menggunakan Bahasa Indonesia, baik ketika berinteraksi di balaidesa maupun di area Wisata Pasir Putih, kecuali dengan anggota pemerintah desa yang dapat dikatakan “tua” maka lebih banyak menggunakan Bahasa Jawa untuk mengantisipasi adanya kesalahpahaman dan demi tercapainya persamaan makna.

b. Komunikasi Verbal dan Non Verbal Pemerintah Desa dengan Pedagang Kaki Lima

Komunikasi verbal yang terjadi dalam komunikasi pemerintah desa dan pedagang kaki lima yaitu secara formal maupun informal. Proses komunikasi dilakukan kapan saja dan dimana saja, baik langsung maupun melalui media surat edaran.

Dikatakan secara informal karena pertukaran pesan terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Biasanya terjadi ketika bertemu langsung di toko atau warung tempat pedagang berjualan atau bisa juga di luar atau dalam acara tertentu. Pemerintah desa menggunakan kata-kata secara langsung kepada para pedagang misalnya

mengenai pemberian bimbingan atau arahan kepada para pedagang kaki lima terkait keadaan lapak mereka. Setiap minggu bahkan setiap hari satgas melakukan pemantauan, berkunjung ke setiap lapak, toko, depot dan ponten untuk sekedar mengingatkan tentang kebersihan lapak mereka. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah desa bertujuan untuk kepentingan para pedagang kaki lima sendiri. Ketika wisatawan datang untuk membeli atau ke kamar mandi dan merasa nyaman dengan keadaan tempat pedagang dan juga kebersihannya maka wisatawan tidak akan segan-segan untuk datang berlibur kembali. Pedagang kaki lima akan mendapatkan keuntungan yang lebih karena hal tersebut, karena mereka menggantungkan wisata sebagai penghidupan mereka.

Penggunaan surat edaran juga termasuk jenis komunikasi verbal yang menggunakan media. Selain dengan kata-kata, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan para pedagang kaki lima juga diperkuat dengan menggunakan media surat edaran yang nantinya akan membuat proses penyampaian pesan atau informasi semakin efektif.

Sadar bahwasanya wisata merupakan milik mereka sendiri, setelah berinteraksi dengan pemerintah desa dan memahami maksud dan tujuannya, pedagang kaki lima secara langsung melaksanakan himbauan tersebut. Dengan tenang hati mereka menjaga lapak mereka, mengatur sedemikian rupa dan membersihkannya agar wisatawan yang datang merasa nyaman. Mereka sadar kalau bukan mereka sendiri lantas harus siapa lagi yang merawat dan mengelola wisata. Hal tersebut dapat

dikatakan sebagai respon atau umpan balik dari pedagang kaki lima setelah melakukan komunikasi dengan pemerintah desa. Tindakan tersebut juga merupakan komunikasi verbal yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dengan pemerintah desa.

Sebaliknya umpan balik yang dilakukan oleh pemerintah desa setelah berinteraksi dengan pedagang kaki lima terkait pengelolaan dan usaha mengembangkan wisata adalah dengan melakukan regulasi para pedagang kaki lima yang berjualan di area wisata. Setiap tahunnya, para pedagang kaki lima bergantian dengan tujuan agar seluruh warga desa dapat merasakan hasil dari wisata tersebut yang merupakan lahan penghidupan bagi warga sekitar. Tindakan tersebut juga merupakan bentuk komunikasi non verbal pemerintah desa dengan pedagang kaki lima. Baik pihak pemerintah desa maupun pihak pedagang kaki lima merasa komunikasi atau koordinasi yang baik diantara keduanya sangatlah penting demi kepentingan bersama.

Pada saat observasi, peneliti menemukan bahwa komunikasi terjadi antar pemerintah desa dengan pedagang kaki lima menggunakan bahasa indonesia dan bahasa jawa, akan tetapi cenderung menggunakan bahasa jawa. Ketika menggunakan bahasa jawa, proses pertukaran komunikasi terjadi lebih efektif karena keduanya memiliki pemahaman yang sama, terlebih bagi pemerintah desa maupun pedagang kaki lima yang sudah berumur atau sudah tua. Mereka mengaku lebih nyaman dan santai ketika berinteraksi menggunakan bahasa jawa.

c. Komunikasi verbal dan Non Verbal Pemerintah Desa dengan Warga Sekitar

Selain dengan pedagang kaki lima, pemerintah desa juga melakukan komunikasi dengan warga sekitar karena warga sekitar juga merupakan bagian dari pemilik wisata. Komunikasi verbal yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan warga dilakukan dengan menggunakan kata-kata secara langsung atau tatap muka (*face to face*) salah satunya mengenai himbuan promosi wisata kepada kerabat atau teman dari warga desa. Karena jika wisatawan semakin meningkat, wisata semakin terkenal, banyaknya masukan dari warga atau wisatawan nantinya wisata akan semakin dibenahi dan pada akhirnya wisata akan semakin maju dan berkembang dan juga menguntungkan warga sekitar.

Selain itu juga mengenai permintaan keikutsertaan dalam mengelola wisata. Pemerintah desa mengajak warga sekitar agar berpartisipasi dalam upaya mengembangkan wisata. Misalnya saja ketika pihak pemerintah desa melakukan komunikasi dengan warga sekitar membahas perizinan untuk membuka tempat parkir di depan rumah warga yang berada tidak jauh dengan wisata. Dengan senang hati warga setempat menerima dengan baik permintaan pemerintah desa tersebut dan kemudian parkir di lahan depan rumah. Ketika pemerintah desa dan pihak warga sekitar melakukan interaksi secara langsung, dapat dikatakan kejadian tersebut adalah komunikasi verbal, ketika warga sekitar menerima dengan senang hati perizinan tersebut berarti mereka

memberikan respon kemudian memberikan *feedback* yang atas apa yang mereka komunikasikan yaitu dengan segera melaksanakan pembukaan parkir di depan rumah sesuai dengan yang diminta pihak pemerintah desa bahkan juga menyewakan kamar mandi. Tindakan tersebut juga dapat dikatakan sebagai komunikasi non verbal yang dilakukan oleh warga sekitar kepada pemerintah desa.

2. Hambatan Komunikasi Interpersonal Warga Area Wisata dalam Mengelola Dan Mengembangkan Wisata Pasir Putih Dalegan

Hambatan atau kendala dalam proses komunikasi pasti ada dalam proses komunikasi, karena dalam kegiatan komunikasi tidak akan selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Dalam komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh warga area Wisata Pasir Putih Dalegan juga mengalami kendala dalam proses komunikasinya, diantara sebagai berikut:

- a. Hambatan teknis, yakni hambatan komunikasi yang disebabkan karena kurang jelasnya aturan yang dibuat oleh pemerintah desa. Dalam hal ini dapat dilihat ketika pihak pemerintah desa menganggap bahwa pedagang kaki lima *nakal* atau tidak menurut peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa karena membuat lapaknya terlihat lebih maju dari yang sudah ditetapkan, akan tetapi dari pihak pedagang kaki lima mengungkapkan bahwa tidak ada peraturan yang tertulis sebelumnya. Dengan begitu maka pedagang kaki lima tetap memajukan lapaknya

dengan alasan agar lapaknya juga diketahui oleh wisatawan yang datang. Tidak adanya teguran yang dilakukan oleh pemerintah kepada pedagang kaki lima menandakan memang belum adanya peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah desa.

- b. Yang kedua adalah hambatan psikologi, dimana hambatan ini dilatarbelakangi dari pengalaman yang pernah dialami oleh pedagang kaki lima sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan yang mereka miliki terhadap pemerintah desa. Kerap kali pedagang kaki lima melakukan komplain kepada pemerintah desa terkait dengan kebijakan yang telah dibuat pemerintah desa misalnya kenaikan harga sewa, harga listik dan kebersihan. Peneliti menemukan jawaban alasan tersebut adalah karena pedagang kaki lima memiliki pengalaman tentang tindakan pemerintah desa yang kurang sigap ketika para pedagang kaki lima telah melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Pedagang kaki lima memiliki kekhawatiran mengenai kenaikan tersebut jika tidak ada alasan yang dapat diterima dengan baik oleh para pedagang kaki lima. Hambatan tersebut yang membuat komunikasi menjadi tidak efektif dan berdampak pada pengelolaan serta upaya mengembangkan wisata.

B. Konfirmasi Temuan dengan Teori

Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti telah menemukan beberapa data mengenai komunikasi interpersonal warga area Wisata Pasir Putih Dalegan yang kemudian akan dilakukan analisa untuk menguji kebenaran hasil temuan dengan teori. Untuk menguji kebenaran hasil dengan teori, maka peneliti mencocokkan

hasil temuan dengan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori interaksi simbolik.

Teori interaksi simbolik merupakan teori yang berusaha menjelaskan bahwa interaksi antar individu melibatkan penggunaan simbol-simbol. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita berusaha mencari makna yang cocok dengan yang dimaksudkan oleh orang tersebut. Selain itu, kita juga menginterpretasikan apa yang dimaksud orang lain melalui simbolisasi yang ia bangun. Dalam penelitian ini tidak terlepas dari tiga konsep dasar interaksi simbolik yaitu pikiran, diri dan masyarakat. Dimana ketiga konsep tersebut mempunyai keterkaitan untuk membangun sebuah hubungan dengan individu lain melalui sebuah interaksi.

Tiga konsep pemikiran George Herbert yang mendasari interaksi simbolik antara lain:

1. Diri (*Self*) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain,
2. Pikiran (*Mind*) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama,
3. Masyarakat (*society*) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

sekitar juga menggunakan simbol-simbol tertentu dalam proses pertukaran pesan. Misalnya ketika perangkat desa melakukan regulasi bagi para pedagang yang berjualan di area wisata, kemudian satgas mengajak para pedagang kaki lima untuk memperhatikan kebersihan dan kenyamanan lapak yang dimiliki. Hal itu merupakan simbol kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah desa, mereka berhak mengatur apa saja demi kebaikan bersama, demi terciptanya pengelolaan yang meningkat dan pada akhirnya wisata akan semakin berkembang yang dampaknya juga dapat dirasakan oleh seluruh warga.

Kemudian simbol yang dimiliki pedagang kaki lima adalah simbol ekonomi, ketika berinteraksi dengan pemerintah desa mengenai pengelolaan wisata maka para pedagang menyepakati bahwa mereka harus berjualan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah desa demi kebaikan bersama. Dan yang terakhir adalah simbol partisipasi yang dimiliki oleh warga sekitar.

Ketiga unsur berupa simbol yang dimiliki oleh pemerintah desa, pedagang kaki lima dan warga sekitar memaknai bahwa Wisata Pasir Putih wajib dikelola bersama-sama karena mereka ada pemilik wisata, mereka sadar akan wisata sebagai lahan penghidupan bagi mereka. Melakukan komunikasi atau koordinasi diantaranya dianggap sangat penting dalam upaya pengelolaan tersebut.

3. Masyarakat

Masyarakat (*Society*) atau kehidupan kelompok, terdiri atas perilaku-perilaku kooperatif anggota-anggotanya. Kerjasama manusia dalam hal ini warga area Wisata Pasir Putih Dalegan yaitu pemerintah desa dengan pengelola dalam wisata memahami maksud dari orang yang diajak berkomunikasi satu sama lain dan mengharuskan warga pengelola untuk mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui komunikasi interpersonal baik verbal maupun non verbal, bagaimana memaknai sebuah simbol yang terak tampak atau disampaikan oleh warga pengelola Wisata Pasir Putih Dalegan baik pemerintah desa, pedagang kaki lima maupun warga sekitar. Masyarakat dalam hal ini adalah seluruh pengelola wisata baik pemerintah desa, pedagang kaki lima maupun warga sekitar dan memilih perannya sendiri secara aktif dan sukarela atas dasar keinginannya yang pada akhirnya menjadikan mereka mengambil peran di tengah masyarakat yakni berusaha bersama-sama mengelola wisata dengan baik. Ketika warga pengelola Wisata Pasir Putih melakukan komunikasi interpersonal satu sama lain, dalam hal tersebut terjadi proses interaksi dan pemaknaan sebuah simbol yang tampak. Selanjutnya adalah berpikir, berpikir bahwa wisata tersebut adalah lahan penghidupan bagi seluruh warga desa termasuk pemerintah desa, pedagang kaki lima maupun warga sekitar area wisata. Sehingga setelah melalui tahap berpikir, pada akhirnya para pengelola Wisata Pasir Putih dapat bertindak yaitu melakukan koordinasi atau komunikasi sesama warga pengelola demi

